

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana.
- Friedman, Lawrence M. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media.
- Hadjon, Philipus M. 1998. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Islamy, M. Irfan. 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cetakan ketiga, Yogyakarta, Liberty.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Polri, 2019, *Buku Saku Polri tentang Penganganan Tindak Pidana Pemilu 2019*, Jakarta, Subdit IV Politik dan Dokumen Bareskrim Polri.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *"Masalah Penegakan Hukum"*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2009. *"Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis"*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2010. *"Penegakan Hukum. Progresif"*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Saleh, Abdul Rahman. 2008. *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz*, Jakarta: Kompas.
- Santoso, Topo DKK. 2006. “*Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*”. Jakarta: Perludem.
- Sinaga, Dahlan, 2018, “*Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*”, Bandung, Nusa Media.
- Sugiono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. Didik Supriyanto. Topo Santoso. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Buku 15*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Remadja Karya.
- _____, 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, Jakarta, Balai Pustaka.

Undang-Undang atau Peraturan yang dipakai:

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157
- Bawaslu, Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324.
- Bawaslu, Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566.
- Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu,
- Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa.
- Bawaslu, Surat Edaran Bawaslu Nomor : 0223/K.Bawaslu/PM.05.00/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penjelasan atas 15 Problematika dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- Kejaksaan Agung, Surat Kejaksaan Agung Nomor : B-1085/E/EJP/02/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jurnal Ilmiah :

Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Pengadilan Khusus*, www.jimly.com. Juli, hlm.1, diakses pada tanggal 4 Pebruari 2021 pukul 13.13 wib.

Barama, Michael, 2016, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, repo unsrat.ac.id. Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016

Simatupang, Joseph Fajar, 2020, *Crime Control Model dan Due Process Model Kesatuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kompasiana, 13 Juli 2020 22:58 Diperbarui: 13 Juli 2020 23:06, hlm.2.

Siswanto, Arie, 2016, *Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 40-42

Link Berita:

Equality and Human Rights Comission, 2018, *Right To A Fair Trial*, [https://www.equalityhumanrights.com/en/human rights act/article-6-right-fair-trial](https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights-act/article-6-right-fair-trial) Last updated: 15 Nov 2018, diakses pada tanggal 23 November 2020. Pukul 09.47 WIB

Fritz Edward Siregar, 2020, *Bawaslu Nilai Peradilan Khusus Pemilu Perkuat Penegakan Hukum*, Sumber : [https://mediaindonesia.com/politik dan hukum/320370/bawaslu nilai peradilan khusus pemilu perkuat penegakan hukum](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/320370/bawaslu-nilai-peradilan-khusus-pemilu-perkuat-penegakan-hukum), diakses pada Kamis, 4 Pebruari 2021 pukul 16.59 wib.

Ida Budiarti, 2018, *Bawaslu Diusulkan untuk Diganti Menjadi Pengadilan Pemilu*, Sumber:[https://regional.kompas.com/read/2018/07/21/08221281/bawaslu diusulkan untuk diganti menjadi pengadilan pemilu](https://regional.kompas.com/read/2018/07/21/08221281/bawaslu-diusulkan-untuk-diganti-menjadi-pengadilan-pemilu), diakses tanggal 27 Januari 2019

M. Prasetyo, 2018, *Biar Tak Ngulur Waktu, Sidang Kasus Pemilu Bisa Jalan Tanpa Kehadiran Terdakwa*, SuksesNews.Net. 27 November 2018, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020. Pukul 22.47 WIB

Ramlan Surbakti, 2021, *Bawaslu Diusulkan Jadi KPHP, Berwenang Menyidik dan Menuntut Pidana Pemilu*, NasionalSindonews.com., diakses pada Selasa, 2 Pebruari 2021 pukul 14.09 wib.

Ratna Dewi Pettalolo. 2018. *Terlapor Pelanggaran Pidana Pemilu Dapat Diproses In Absentia*, diakses pada tanggal 25 September 2020. Pukul 16.16 WIB.

Ruslan Husen, 2019, *Transformasi Bawaslu Menjadi Peradilan Khusus Pemilu*, https://sulteng.bawaslu.go.id/transformasi_bawaslu_menjadi_peradilan_khusus_pemilu, 28 September 2019, diakses pada Kamis, 4 Pebruari 2021 pukul 16.41 wib

Materi Kuliah:

Hibnu Nugroho. 2020. *Materi Kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana*. Purwokerto, Kuliah MIH Unsoed.

